

The President Post

THE SPIRIT OF INDONESIA

Twitter @President_Post Facebook The President Post

Luluk Sumiarso: Restorasi Pengelolaan Energi

Negara mesti mengatur pengelolaan energi agar tercapai swasembada di mana kebutuhan energi bisa dipenuhi dari sumber dalam negeri. Andai sampai hari ini kita masih mengimpor energi, artinya kita harus melakukan restorasi dalam pengelolaan energi.

Sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan ayat 3, negara harus memanfaatkan sumber alam untuk kemakmuran masyarakat. Terkait dengan energi, pemerintah harus mengelola sumber-sumber energi yang ada untuk kesejahteraan bersama. "Untuk itulah negara harus mengatur pengelolaan energi," kata Luluk Sumiarso, mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) periode 2006-2008.

Menurut Luluk yang saat ini menjadi Ketua International Institute for Clean Energy and Climate Change (IICECC) Indonesia memiliki sumber energi yang berlimpah. Potensi hydro power (air) bisa mencapai 76.000 megawatt, sedangkan potensi sumber panas bumi (geothermal) adalah 79.000 megawatt. "Indonesia adalah negara super power panas bumi," lanjut pria kelahiran Ponorogo, 11 Mei 1951 ini.

Namun sayangnya, Indonesia masih fokus pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Padahal, produksi dan cadangan bahan bakar fosil (BBM) ini terus menurun. Sementara, sumber energi terbarukan belum digarap dengan baik.

Luluk menjelaskan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah salah kaprah. Semestinya subsidi hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu (kaum dhuafa). Tetapi kenyataannya, subsidi BBM saat ini lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah yaitu mereka yang mempunyai kendaraan pribadi. "Subsidi BBM salah kaprah. Subsidi itu untuk dhuafa," lanjut alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung itu.

Menurut Luluk ada cara untuk mengendalikan subsidi agar terarah dan tepat sasaran. Saat menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian ESDM tahun 2001-2003, ia pernah menerapkan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu. "Subsidi hanya diberikan untuk pemakai listrik 450 VA," jelas 'bos ketoprak' Puspobudoyo itu.



Mereka yang berhak mendapatkan subsidi adalah pelanggan listrik tertentu yang menjadi sasaran subsidi, yaitu kelompok pelanggan sosial (S1 dan S2), rumah tangga (R1), bisnis (B1), dan industri (I1) dengan daya terpasang sampai dengan 450 VA untuk konsumsi sampai dengan 60 kwh per bulan.

Dengan cara tersebut, pemerintah bisa memperkecil subsidi listrik. "Tahun 2003, subsidi listrik hanya Rp3,5 trilyun. Tahun 2006 menjadi Rp31,246 trilyun," ujar alumni University of Pennsylvania USA jurusan Energy Management and Policy itu. Seperti diketahui, tahun 2003 Luluk tak lagi menjadi Dirjen LPE. Ia menduduki jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (2003-2006).

Saat menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2006-2008) Kementerian ESDM, Luluk pernah menyiapkan konsep yang memungkinkan penurunan harga BBM bersubsidi, menyusul kecenderungan menurunnya harga minyak dunia saat itu. Konsep itu dinamakan harga jual BBM otomatis dengan batas atas (HJ-OBA).

"Konsep ini mengikuti kecenderungan naik dan turunnya harga minyak dunia. Artinya, kalau harga minyak dunia turun maka pemerintah akan

menurunkan harga BBM bersubsidi," katanya. Patokan harga BBM di dalam negeri mengacu pada MOPS (Mean of Plats Singapore).

Saat menurunkan harga itu, pemerintah menegaskan kepada masyarakat bahwa harga BBM akan mengikuti harga MOPS. Jadi, kalau harga MOPS mengalami kenaikan, otomatis harga BBM juga turut naik. "Namun, apabila terjadi kenaikan MOPS yang menyebabkan harga patokan di atas harga eceran, maka untuk melindungi kepentingan publik ditetapkan batas atas harga jual, yaitu tingkat harga jual BBM saat ini sesuai Perpres No 55 Tahun 2005," katanya.

Harga patokan BBM bersubsidi adalah harga MOPS rata-rata tiap bulan sebelumnya ditambah alpha (biaya distribusi dan margin). Sedangkan harga eceran ditetapkan melalui Perpres yang selanjutnya penyesuaian harga jual ecerannya dilakukan Menteri ESDM setelah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. "Selisih harga patokan dan harga jual eceran disubsidi pemerintah," lanjutnya.

Sayangnya, usulan Luluk itu kandas di tengah jalan. Kini, Ketua International Institute for Clean Energy and Climate Change itu mengusulkan ide baru untuk menekan subsidi BBM yaitu dengan Rasionalisasi Subsidi. "Konsepnya seperti apa, nanti saya jelaskan," kata Luluk menutup pembicaraan dengan The President Post di Jakarta, belum lama ini. (jok)

Didukung Oleh:

Indonesia
Public-Private Partnership

**INSTITUT INVESTASI
INDONESIA**

Riset dan Sumber Daya Manusia
Bekerja Sama Dengan:



Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan:

Pemimpin Redaksi:
Rachmat Wirasena Suryo

Sekretaris Redaksi:
Nourul Ulfah

Redaktur:
Inggit Agustina
Joko Harismoyo

Reporter:
Heros Barasakti

Desainer Grafis:
Nike Andriana

Marketing dan Event:
Putri Kenanga
Ronni Ferdy

Account Executive:
Achmad Iqbal
Ike Mayasari

Sirkulasi dan Distribusi:
Maman Panjilesmana
Rifki Amiroedin

Penanggung Jawab Website:
Reza Partakusuma
Irawan Bambang Sugeng

Alamat Redaksi dan Sirkulasi:
Menara Batavia 2nd Floor
Jl. K. H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Ph. (021) 57930347
Fax (021) 57930347
Email Redaksi:
ulfah@thepresidentpost.com

Diterbitkan oleh PT. Media Prima Nusa
www.readtpp.com
www.thepresidentpost.com
www.thepresidentpostindonesia.com

WAHYU
HIDAYAT

Perlu Equal Treatment Terhadap BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang tunduk dan patuh kepada aturan-aturan perseroan yang ada. Oleh karena itu pemerintah wajib memperlakukan BUMN seperti halnya perusahaan lainnya.

Menurut Wahyu Hidayat, mantan Deputy Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN, BUMN adalah perusahaan bukan lembaga negara. "BUMN terbebas dari keuangan negara," kata Wahyu saat berbincang dengan The President Post di Jakarta, Senin (11/8).

Sudah seharusnya pemerintah juga memperlakukan BUMN sebagai perusahaan, sama dengan perusahaan swasta lainnya. Beda BUMN dengan perusahaan swasta hanya soal modal. BUMN dimodali oleh negara. "Ingat, dimodali bukan dibiayai. Negara hanya mengeluarkan modal atau menambah modal," tegasnya. Sebagai pemodal, pemerintah berhak memperoleh deviden.

Kesamaan BUMN dengan perusahaan lain adalah soal pajak. BUMN juga membayar pajak kepada negara sesuai aturan hukum yang ada. BUMN pun memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.

Berkaitan dengan CSR itu, saat menjabat Deputy, Wahyu pernah mengeluarkan surat edaran soal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam surat edaran itu, Kemeng BUMN menunjuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai

pelaksana program PKBL. Dengan demikian perusahaan bisa fokus kepada core business dan tidak mengurus dana di luar usahanya. Apalagi, BUMN tidak didesain untuk membina pengusaha kecil dan mikro sehingga tidak memiliki kapasitas, keahlian dan manajemen yang diperlukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dia menambahkan, berdasarkan pengalamannya mengelola sejumlah BUMN, pemerintah masih membedakan BUMN dengan perusahaan swasta. Padahal, mereka sama-sama pelaku ekonomi yang harus mendapatkan keuntungan. "Bisnis yang kurang menguntungkan diberikan kepada BUMN," tambah Wahyu yang pernah menjadi Sekretaris Kemeneq BUMN sebelum menduduki jabatan Deputy.

Wahyu memberi contoh, saat dirinya mengelola Merpati Airlines dan terjadi bencana tsunami di Aceh, pemerintah langsung meminta kepada Merpati untuk mengangkut bantuan ke lokasi gempa. Ia meminta surat perintah kerja yang ditandatangani oleh pihak terkait. "Sebagai perusahaan kita kan harus bertanggungjawabkan pengeluaran. Tidak bisa sembarangan," tambah pria kelahiran Sidoarjo, 25 Juni 1959 itu.

Guna meningkatkan kinerja BUMN yang ada di Indonesia, Wahyu yang kini menjadi Komisaris di PT Semen Indonesia itu mengatakan, ada empat langkah yang harus dijalankan oleh Kemeneq BUMN. Pertama, semua BUMN harus mengisi data asset yang mereka miliki. "Data itu harus di-update tiap tahun,"

tambahnya. Melalui pemetaan asset BUMN ini pemerintah bisa melihat kinerja masing-masing BUMN serta mencari solusi jika ditemukan kendala di lapangan.

Cara kedua adalah membentuk Talent Pool atau Executive Development System (EDS). Masing-masing BUMN memiliki Talent Pool yang merupakan wadah untuk calon-calon pemimpin BUMN di masa mendatang. "Dengan adanya talent pool, praktek backup – mem-backup direksi atau komisaris diharapkan tidak akan ada lagi," tambah Wahyu.

Direksi BUMN akan berasal dari internal kecuali BUMN itu tidak memiliki ahlinya. BUMN akan melakukan fit and proper test kepada karyawan yang dinilai memiliki kompetensi untuk menjadi calon pemimpin. Selanjutnya, pegawai yang lolos uji kepatuhan dan kelayakan tersebut ditempatkan dalam wadah tersebut.

Sedangkan cara ketiga adalah penerbitan Kriteria Kinerja Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN. Penilaian ini meliputi tujuh aspek yaitu leadership, strategic planing, customer focus, analisa dan pengetahuan manajemen, ketenaga kerjaan, operasional dan hasil usaha.

"Cara keempat adalah penerapan Reward Remuneration System yang harus disesuaikan," jelasnya. Sistem remunerasi ini harus ditinjau ulang tiap tahun untuk meningkatkan kinerja BUMN. (jok)

Jokowi akan Rampingkan Kabinet

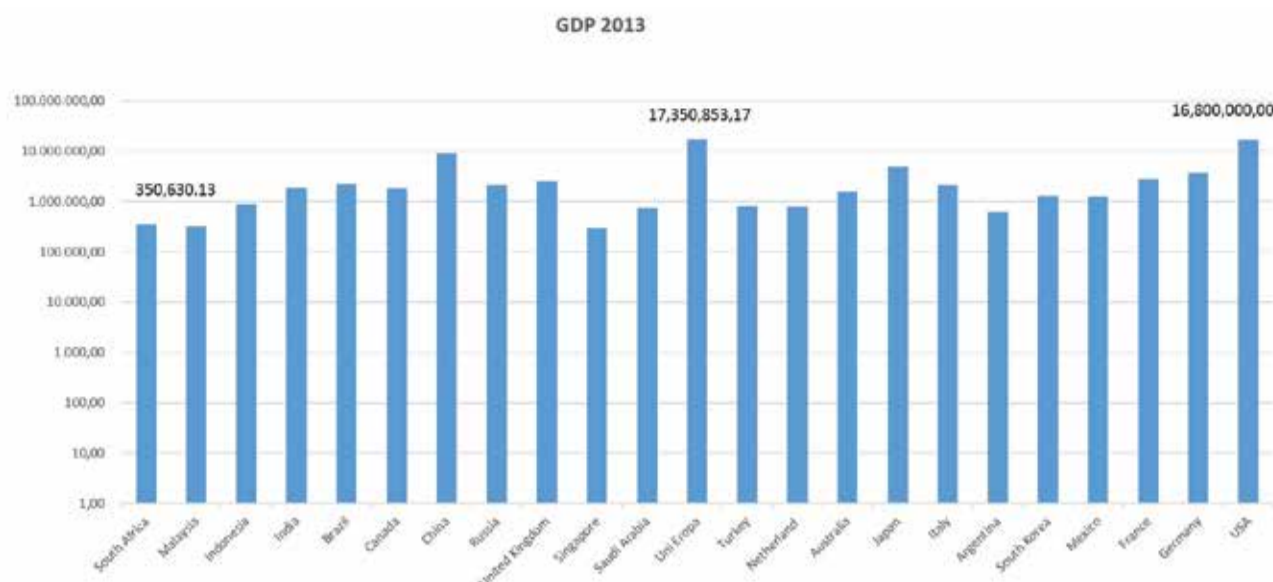
Guna menciptakan pemerintahan yang efisien untuk merealisasikan visi misi saat berkampanye, presiden terpilih Joko “Jokowi” Widodo berencana merampingkan kabinet. Ia akan mengurangi jumlah menteri dari 34 menjadi 27 dengan melakukan penggabungan beberapa kementerian, tapi juga menambah beberapa pos ‘khusus’.

“Salah satu rencana Tim Transisi adalah menyusun kabinet baru yang efektif dan efisien untuk mewujudkan visi misi Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawacita,” kata Andi Widjajanto, wakil Tim Transisi, di Jakarta belum lama ini.

Nawacita adalah sembilan program unggulan Jokowi-JK dalam lima tahun ke depan seperti pemberdayaan sektor pertanian dan perikanan, revitalisasi pasar tradisional, pengembangan ekonomi kreatif, serta mempermudah akses pendidikan dan kesehatan.

Beberapa kementerian yang akan digabung adalah perdagangan dan industri. Beberapa sektor sejenis seperti pertanian, perkebunan, dan agrikultur akan dikelola oleh satu kementerian untuk menjamin pasokan pangan.

Sementara itu untuk memberi perhatian serius kepada sektor kelautan akan dibentuk Kementerian Maritim yang bertugas membangun infrastruktur kelautan guna mewujudkan visi Jokowi membangun “tol laut” dengan menyediakan kapal-kapal yang menghubungkan seluruh kota di Indonesia, dari barat sampai ke timur.



Terlalu Gemuk

Struktur kabinet di Indonesia, menurut Christianto Wibisono Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), masih terlalu gemuk. Total jumlah kabinet di Indonesia, dari presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri dan kepala lembaga negara adalah 62.

Jumlah ini adalah terbesar ketiga di dunia setelah Afrika Selatan (71) dan Malaysia (64). Dengan struktur gemuk seperti ini, pemerintah dinilai tidak efektif. Gross Domestic Product (GDP) per kapita 2013 Indonesia menduduki ranking 22, sementara Malyasia peringkat 18 dan Afsel (71).

Bandingkan dengan struktur pemerintahan negara maju. Australia yang menduduki peringkat 1 GDP per kapita 2013 hanya memiliki 19 anggota kabinet. Singapura yang menempati urutan 2 GDP per kapita 2013 mempunyai anggota kabinet 14, sedangkan Amerika Serikat yang berada di nomor 3 memiliki anggota kabinet 15 (lihat tabel).

Menurut Christianto, Jokowi cukup memiliki 17 kementerian agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien sehingga bisa bersaing di pasar global. Kabinet RI pernah mencapai rekor 104 menteri pada era Kabinet Dwikora II 24 Feb-28 Maret 1966. (jok)

PERINGKAT	NEGARA	KABINET						PDB PER KAPITA 2013		PDB - 2013	
		PRESIDEN/PM	WAKIL PRESIDEN/DEPUTI PM	MENTERI	WAKIL MENTERI	LAINNYA	TOTAL	JUMLAH	PERINGKAT	JUMLAH	PERINGKAT
1	South Africa	1	1	32	37		71	6.617,91	21	350.630,13	21
2	Malaysia	1	1	23	29	10	64	10.513,71	18	312.435,49	22
3	Indonesia	1	1	34	19	7	62	3.475,25	22	868.345,65	16
4	India	1		23	22		46	1.498,87	23	1.876.797,20	11
5	Brazil	1	1	24		15	41	11.208,08	16	2.245.673,03	8
6	Canada	1		25		13	39	51.910,82	4	1.825.096,39	12
7	China	1	4	23		7	35	6.807,43	20	9.240.270,45	3
8	Russia	1	9	23			33	14.611,70	15	2.096.777,03	9
9	United Kingdom	1	1	18		13	33	39.350,64	8	2.522.261,11	7
10	Singapore	1	2	15		14	32	55.182,48	2	297.941,26	23
11	Saudi Arabia	1	2	26			29	25.851,60	13	745.272,53	19
12	Uni Eropa	1	4	22			27	34.240,20	11	17.350.853,17	1
13	Turkey	1		21	4		26	10.945,92	17	820.206,96	17
14	Netherland	1	1	11	7		20	47.617,40	5	800.173,48	18
15	Australia	1	1	17			19	67.468,07	1	1.560.597,15	13
16	Japan	1		17		1	19	38.492,09	9	4.901.529,52	4
17	Italy	1		13		4	18	34.619,25	10	2.071.306,89	10
18	Argentina	1		16			17	14.760,20	14	611.755,08	20
19	South Korea			17			17	25.976,95	12	1.304.553,97	14
20	Mexico			17			17	10.307,28	19	1.260.914,66	15
21	France	1		16			17	41.420,76	7	2.734.979,06	6
22	Germany	1	1	14			16	45.084,87	6	3.634.822,58	5
23	USA			15			15	53.142,89	3	16.800.000,00	2

GEDE
RAKA

Kabinet Harus Diisi Orang Berkarakter Kuat

Tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah baru sangat kompleks, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Oleh karena itu kabinet mendatang harus diisi oleh orang-orang yang memiliki karakter kuat.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Gede Raka, guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) yang saat ini mengelola lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendidikan, Masyarakat Pendidikan Sejati kepada The President Post di Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Menurut Raka, saat ini Indonesia menghadapi tantangan berat, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan ke dalam ada tiga. Pertama, masalah ke-Indonesia-an. Di berbagai daerah muncul konflik horizontal.

Masyarakat lebih menonjolkan kedaerahan dan suka main hakim sendiri. "Kolektivitas sebagai bangsa menjadi masalah," katanya.

Persoalan internal kedua adalah kesenjangan. Perbedaan antara kaya dan miskin semakin lebar. Kesenjangan pembangunan antara kota dan desa makin besar. Pembangunan Indonesia bagian barat dan timur juga timpang. "Pertumbuhan ekonomi boleh besar tetapi kesenjangan seperti ini tidak kita inginkan," tambah Raka.

Masalah internal ketiga adalah korupsi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi besar namun korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini. "Kita harus bisa keluar dari kebiasaan pagar makan tanaman," lanjut lelaki yang kini juga menggeluti bisnis sebagai konsultan manajemen itu. Dia pun menambahkan, budaya

korupsi menyebabkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain menjadi lemah.

Sementara itu, tantangan eksternal yang dihadapi kabinet mendatang ada dua. Pertama, masalah kemandirian. "Kita belum mandiri secara ekonomi," tegasnya. Akibatnya, beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah kadang kala tersandera oleh kebijakan yang dibuat oleh negara lain. Persoalan eksternal kedua adalah ketertinggalan. Kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang dulu sejajar dengan kita.

"Dua puluh tahun lalu, kita sejajar dengan China dan India," kata Raka. Namun, saat ini kita jauh tertinggal dibandingkan dengan kedua negara itu. Industri kedua negara berkembang pesat dan mampu ekspansi ke negara lain, termasuk ke Indonesia.

Karakter Kuat

Menurut Raka, ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon menteri dalam kabinet Jokowi-JK mendatang. Pertama, memiliki karakter kuat dan baik. Ini berarti, mereka yang duduk di kabinet harus jujur dan berani mengubah keadaan. "Berani mengambil keputusan yang tidak populer demi kebaikan jangka panjang. Jangan nyari aman sendiri," katanya. Sebagai pembuat kebijakan, menteri harus fokus kepada kepentingan masyarakat, bukan mengutamakan kepentingan sendiri atau golongan.

Syarat kedua, memiliki wawasan kebangsaan / nasional. Saat ini, para pengambil kebijakan

berpikir Indonesia itu seolah-olah hanya Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang) sehingga banyak kebijakan yang mengabaikan kepentingan daerah ini dan melupakan kepentingan daerah lain.

"Menteri harus memiliki loyalitas kepada negara bukan kepada golongan atau partai," lanjut Raka.

Sedangkan syarat ketiga adalah inovatif. Menteri bukan seorang administrator. Mereka semestinya bisa menemukan cara baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. "Seorang pemimpin harus mampu memunculkan potensi dan partisipasi masyarakat," jelasnya.

Syarat keempat, lanjut pria yang pernah mengambil studi di Amerika Serikat itu, adalah mampu mewujudkan cita-cita menjadi kenyataan. Pemimpin tidak hanya pandai merencanakan tetapi harus bisa mewujudkan impian itu menjadi kenyataan.

Untuk mencari pemimpin yang memenuhi empat kriteria itu, dapat dilakukan melalui pencarian dan juga mendengarkan aspirasi masyarakat. "Kombinasi antara masukan masyarakat dan searching," kata Raka. Meski demikian, presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan menteri. Menteri dapat berasal dari partai maupun nonpartai yang penting memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. (jok)

BAMBANG S.
WIDJANARKO

Perbaiki Data Pertanahan di Indonesia

Sengketa lahan yang sering muncul di berbagai wilayah dipicu oleh lemahnya data pertanahan yang dimiliki oleh pemerintah. Selama ini data pertanahan bersumber dari data yang ada di desa, sementara data tersebut masih carut marut.

Untuk itu, pemerintah baru harus segera memperbaiki data pertanahan yang meliputi tata usaha penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) di tingkat desa. Menurut Bambang Sulistyio Widjanarko, perbaikan data di desa bisa dilakukan melalui Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM). Usulan itu pernah disampaikan Bambang saat dia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah (2004-2008).

MPBM mampu mengatasi keterbatasan anggaran negara untuk melakukan inventarisasi P4T sekaligus melakukan revitalisasi otonomi desa dalam mengembangkan akar budaya bangsa. Konsep dasar MPBM adalah melibatkan masyarakat dalam pemetaan tanah di wilayahnya dengan bimbingan dan pengawasan dari BPN. "Kita memilih empat warga desa untuk dilatih dan melakukan pengukuran tanah di desanya," ujar Bambang saat berbincang-bincang dengan The

President Post di Jakarta, Senin (11/8).

Hasil pemetaan dari petugas desa kemudian diumumkan kepada masyarakat. Mereka yang keberatan dengan hasil pengukuran itu bisa mengajukan peninjauan ulang kepada aparat desa. "Nanti kepala desa dan aparat yang menyelesaikan sengketa," tambah pria kelahiran Solo, 5 Februari 1949 itu.

Bambang menambahkan, model MPBM bisa diterapkan sebagai langkah revitalisasi profil desa sehingga profil desa muatannya data yang akurat, detil hingga bidang tanah, clear, clean dan fresh setiap saat tanpa dibatasi oleh keterbatasan anggaran negara. Melalui MPBM rakyat desa dicerdaskan mendata, mengelola, memelihara dan memberi pelayanan data profil desa untuk berbagai keperluan termasuk sebagai tanda penegasan dan pengakuan hak atas tanah adat, keperluan statistik dlsb.

Apabila data di tingkat desa sudah tidak masalah, data tersebut kemudian menjadi dasar dari BPN untuk membuat pemetaan tanah guna membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas).

Tanah Milik Rakyat

Alumni S2 Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1987 itu mengatakan rakyatlah pemilik tanah, bukan negara. Konsep negara sebagai pemilik tanah diwariskan oleh kolonial Belanda yang menganggap Indonesia sebagai negara taklukan sehingga menerapkan teori domeinverklaring (negara pemilik tanah).

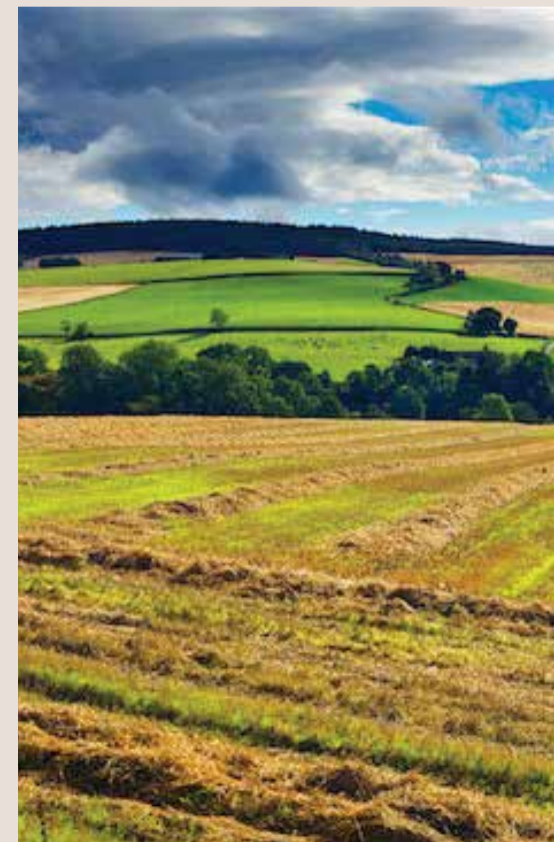
Dalam menetapkan hak atas tanah digunakan teori de-jure de-facto. "Selama tidak ada bukti tertulis maka tanah itu milik negara," jelas mantan Direktur Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis BPN itu.

Dengan domeinverklaring dan teori de-jure de-facto negara sebagai pemilik tanah bisa memberikan erpach atau Hak guna Usaha (HGU) kepada para pemodal. Rakyat yang lebih berhak berdasarkan hukum adat menjadi prioritas yang terakhir setelah tanah HGU menjadi terlantar. Padahal berdasarkan hukum adat, rakyat adalah pemilik tanah.

Karena tanah adalah milik rakyat, maka jenis hak atas tanah berdasarkan pasal 16 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), akan mengalami penyederhanaan yaitu hak milik (bersifat permanen hanya untuk WNI/Rakyat Indonesia) dan hak pakai (bersifat sementara /non permanen) untuk yang bukan WNI seperti badan hukum dan lembaga pemerintah.

Tanah negara atau tanah dikuasai negara tidak ada lagi. Kawasan Hutan sudah tidak ada lagi. Untuk keperluan konservasi dialokasikan lahan hutan yang merupakan bagian dari cadangan tanah nasional dan daerah.

Pajak bumi sudah tidak diberlakukan karena tanah adalah milik rakyat. Yang dikenakan pajak adalah penggunaan dan pemanfaatan tanah atau out put atau hasil pengusahaan tanah. Pemberian hak sudah tidak perlu, yang masih perlu ada sifatnya penegasan dan pengakuan negara terhadap tanah milik rakyat. (jok)



Indonesia Bisa Menjadi Negara Maritim yang Hebat

Kekayaan alam dan posisi geografis Indonesia menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maritim paling hebat di dunia, menyaingi Amerika Serikat. Sudah saatnya Indonesia mengubah mind set dari daratan menjadi maritim.

Kekayaan alam Indonesia mengharuskan negeri ini menjadi negara kaya dan makmur. "Pilihannya hanya ada dua, kaya dan kaya banget," ujar Edib Muslim, Kepala Divisi Komunikasi Publik dan Promosi Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) kepada The President Post di Jakarta, Selasa (19/8) pagi.

Optimisme Edib makin besar setelah pemerintah menggagas konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sejak 27 Mei 2011. Konsep ini menunjukkan pemerintah memiliki kesungguhan hati, berpikir dengan cara yang tidak biasa, cerdas dan terus mencari terobosan. "Ini menunjukkan komitmen bangsa untuk memiliki daya saing di tengah perekonomian dunia," jelasnya.

Melalui konsep ini pemerintah menargetkan pada tahun 2025, pendapatan per kapita rakyat Indonesia mencapai US\$14.250-16.000. Oleh karena itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. "Harus di atas 7,2%," tegas Edib.

Pemerintah, lanjutnya, bersifat terbuka jika konsep MP3EI akan diubah karena dokumen itu bersifat terbuka dan bisa disempurnakan. "Jika ada yang salah, dikoreksi. Jika ada yang kurang bisa ditambah," ujar Edib. Dia pun menuturkan, tidak ada bangsa besar di dunia ini tanpa kesinambungan. Negara Maritim

Dalam menyusun konsep MP3EI, pemerintah mengacu kepada wawasan nusantara. Laut bukanlah pemisah wilayah melainkan akses yang menyatukan antarpulau. Oleh sebab itu dalam menyusun tata

EDIB
MUSLIM



ruang, laut dan darat harus terintegrasi.

Edib senang, konsep tol laut menjadi pembicaraan. Konsep tol laut yang dimaksudkan adalah tersedianya kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh nusantara. Konsep tersebut sebenarnya sudah ada dalam program Sistem Logistik Nasional dan MP3EI sehingga bisa saling melengkapi.

Menurut Edib, ada tiga syarat untuk menjadi negara maritim. Pertama, kemampuan mengelola aset yang ada di wilayah perairan. Potensi sumber daya ikan Indonesia sangat besar. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengungkapkan, besaran potensi hasil laut dan perikanan di Indonesia mencapai Rp3.000 triliun per tahun, sedangkan yang sudah dimanfaatkan Rp225 triliun atau sekitar 7,5% saja.

Sedangkan syarat kedua adalah kemampuan mengelola akses. "SLoC (Sea Lane of Communication) belum dimanfaatkan secara optimal," ujar Edib. Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis karena memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia yaitu Selat Malaka, di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global. Sekitar 45% komoditi yang diperdagangkan di dunia melewati selat tersebut. "Justru Singapura dan Malaysia yang memanfaatkan jalur ini," kata Edib.

Untuk memanfaatkan potensi Selat Malaka, pemerintah melalui MP3EI sudah mengambil langkah startegis dengan mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi pusat perdagangan dan ekonomi di kawasan barat Indonesia. Sementara Pelabuhan Bitung menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Indonesia.

"Nantinya kegiatan ekspor import harus melewati dua pelabuhan itu. Tidakboleh langsung ke Jakarta atau Surabaya," tegasnya. Dengan cara ini pemerintah turut melindungi komoditi domestik dari serangan barang mancanegara.

Sementara itu syarat ketiga negara maritim adalah membentuk rezim maritim yang mengatur mengenai tata kelola sumber daya manusia, ilmu dan teknologi serta regulasi. Edib mencontohkan, tata kelola SDM kelautan Indonesia masih lemah.

"Fakultas Perikanan di Universitas Manado mencontoh kampus di Surabaya. Harusnya, di Manado bisa dibentuk Fakultas Sushi," jelasnya. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan nilai lebih dari pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kelautan. (jok)



Laut Harus Menjadi Tulang Punggung Sistem Transportasi

Sebagai negara kepulauan dengan laut yang amat luas, Indonesia harus menempatkan laut sebagai tulang punggung (back bone) sistem transportasi nasional. Pemerintah diminta membangun sistem transportasi multimoda secara proporsional. Demikian pendapat dari Setijadi, pendiri Supply Chain Indonesia (SCI), saat berbincang-bincang dengan The President Post di Jakarta, belum lama ini.

Menurut pria berbadan langsing ini, masalah di dalam sistem logistik Indonesia, sangat kompleks karena melibatkan berbagai faktor, seperti keragaman komoditas, luas wilayah dan kondisi geografis, kondisi infrastruktur, dan sebagainya. Faktor lainnya adalah banyak pihak terkait dengan berbagai kepentingan dalam sistem logistik, seperti beberapa kementerian dan instansi di tingkat pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan lainnya.

Di sisi lain, implementasi Blue Print Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) belum optimal. Padahal blue print ini telah dirilis melalui Keputusan Presiden Nomor 26/2012 tanggal 5 Maret 2012. "Kendala implementasi Sislognas adalah komitmen para pihak terkait dalam pengembangan logistik nasional, terkait itikad para pihak untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan tujuan Sislognas pada 2025," ujar pria kelahiran Purwokerto, 2 Juli 1971 itu.

Selain komitmen dari pemerintah pusat, komitmen serupa juga diperlukan dari pemerintah daerah, BUMN dan swasta sebagai pelaku dan penyedia jasa logistik, selain asosiasi dan pihak lain.



Masalah lain yang mesti mendapat perhatian adalah evaluasi dan pengawasan dalam implementasi Sislognas, seperti perencanaan dan pembangunan infrastruktur logistik, maupun dalam kegiatan operasionalnya. Dalam tahap operasional, evaluasi dan pengawasan diperlukan berkaitan dengan kinerja pelayanan yang pada akhirnya dapat merugikan para pengguna tersebut.

Alumni S2 Bidang Tekno Ekonomi Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menambahkan, sistem logistik nasional yang belum memadai menjadi kendala bagi pengusaha dalam menjalani aktivitas bisnisnya. Kondisi tersebut berdampak negatif bagi daya saing

produk baik di dalam maupun luar negeri karena terdapat fluktuasi harga dan disparitas harga antar wilayah untuk beberapa barang, komoditas pokok dan strategis di Indonesia.

Oleh karena itu, Sislognas perlu diperkuat untuk mengelola dan mengkoordinasikan komponen penyusun sistem logistik yang meliputi komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM), Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik, Infrastruktur dan Teknologi, dan Regulasi dan Kebijakan dalam rangka menata dan mengelola pergerakan barang atau komoditas dari wilayah penghasil ke wilayah konsumen secara efektif dan efisien untuk membangun daya saing nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (jok)

"Jika kita mempunyai keinginan kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya."

- Soekarno



TAHUN

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA



Seminar Poros Maritim: Kembangkan SDM Kelautan

Besarnya potensi kelautan Indonesia terhalang oleh minimnya potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Karena itu pemerintah diminta mengembangkan SDM Kelautan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Demikian hasil kesimpulan dari seminar “Poros Maritim untuk Kesejahteraan dan Keadilan” yang diselenggarakan oleh Tim Kajian Nusantara Rumah Koalisi Indonesia Hebat (RKIH) bekerjasama dengan The President Post di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kabinet Gotong Royong, mengatakan Indonesia memiliki modal dasar untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan berdaulat. Modal itu meliputi jumlah penduduk yang mencapai 250 juta, kekayaan alam yang melimpah dan beragam, serta posisi geoekonomi yang sangat strate-

gis karena berada di pusat perdagangan global. Menurut Rokhmin, Indonesia bisa menjadi negara maritim yang hebat. “Indonesia negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan memiliki 95.181 km garis pantai, terpanjang kedua setelah Kanada,” jelas guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Apalagi, kata Benny Woenardi, Managing Director Cikarang Dry Port yang menjadi salah satu panelis dalam seminar itu, mengatakan bahwa lalu lintas container dunia mengarah ke negara Asean dan Asia Timur. Tetapi, Indonesia hanya memiliki lima pelabuhan besar yaitu satu di Belawan, tiga di Jawa dan satu di Makassar.

Kurang optimalnya pemanfaatan potensi laut Indonesia, kata Setijadi Chairman Supply Chain Indonesia, disebabkan oleh kurangnya perhatian

pemerintah terhadap sektor kelautan. “Sebagai negara kepulauan, transportasi laut harus menjadi back bone,” tegas Setijadi. Pembangunan sistem logistik laut juga masih timpang dan fokus ke Indonesia bagian barat. Akibatnya, kapal dari timur ke barat banyak yang kosong karena tidak ada muatan.

Beberapa peserta seminar memberi masukan untuk pengembangan maritim Indonesia. Adiwijaya dari President University mengatakan pengembangan kelautan di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengubah mind set. “Kita tidak perlu pembangunan, tetapi perlu mengembangkan bisnis. Dengan mengembangkan bisnis, otomatis ada pembangunan,” katanya. Cara kedua adalah mengembangkan floating port untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia.

Usulan menarik datang dari Andreanus, peneliti dari IPB Bogor. Menurutnya, kemampuan SDM kelautan Indonesia masih sangat kurang. Sekolah di bidang kelautan masih minim. “Sebagian besar lulusannya memilih kerja di kapal asing,” keluh-nya. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap pengembangan SDM kelautan ini.

Selain SDM, kendala pengembangan sektor maritim adalah sulitnya nelayan menembus akses permodalan. Bank sulit memberi kredit kepada nelayan. “Pemerintah Jokowi akan membangun bank agro maritim,” kata Rokhmin.

Sementara itu Capt Lai Chun Wen, pengusaha dari Taiwan yang juga berpengalaman sebagai kapten kapal, mengusulkan penggunaan Set Net dan Purse Seiner. “Dengan cara ini, ikan yang tertangkap bisa mencapai 100-200 tons per hari. Sistem ini juga ramah lingkungan karena hanya ikan yang besar yang tertangkap.”

Seminar yang digelar di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta menghadirkan Rokhmin Dahuri sebagai keynote speaker serta panelis Benny Woenardi (Cikarang Dry Port), Setijadi (Suplly Chain Indoensia), dan Capt Lai Chun Wen, pengusaha asal Taiwan. (jok)

